

Pengaruh Opini Audit, *Intergovernmental Revenue*, dan *Tax Effort* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Bunga Permata Sari^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Korespondensi: permatabung88@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of audit opinion, intergovernmental revenue and tax effort on local government financial performance. The population in this study were regencies / cities in West Sumatra Province in 2018-2022 using SPSS 25 software. This study uses secondary data with a sample of 19 districts / cities for five years, taken through the total sampling method. This study uses multiple linear regression analysis to test the hypothesis. The results showed that intergovernmental revenue and tax effort have a significant positive effect on local government financial performance, while audit opinion has no significant effect on local government financial performance. It is expected that additional independent variables that affect the financial performance of local governments will be selected for future study.

Keywords : *Audit; Intergovernmental Revenue; Local Government; Tax Effort.*

How to cite (APA 6th style)

Sari, B.P., & Arza, F.I. (2025). Pengaruh Opini Audit, *Intergovernmental Revenue*, dan *Tax Effort* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 3(2), 250-266. **DOI:** <https://doi.org/10.24036/jnka.v3i2.80>

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya finansialnya secara efektif dan efisien. Menurut Novita & Arza (2024), kinerja keuangan tidak hanya berfungsi untuk mengukur optimalisasi sumber daya, tetapi juga mencerminkan kemandirian daerah dalam mengurangi ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan utama, di samping memanfaatkan pendapatan transfer dengan bijaksana. Sebagaimana diungkapkan oleh Sesotyaningtyas (2012), evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana efektifitas daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, menjalankan pembangunan, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang akuntabel.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah juga berperan penting dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengatur bahwa kinerja keuangan merupakan hasil dari tindakan yang dicapai melalui penggunaan anggaran, yang dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas yang terukur. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi sangat krusial dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Bastian, 2010). Melalui analisis yang mendalam, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan sumber daya serta melakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Dalam penelitian ini, peneliti mencermati fenomena menarik di Provinsi Sumatera Barat, di mana meskipun sebagian besar kabupaten/kota berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode 2018-2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, yakni hanya 12,01% dari total pendapatan. Menurut data yang dikumpulkan, total realisasi pendapatan di seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 19.687,97 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 1,23 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi peningkatan kinerja keuangan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan menarik perhatian peneliti untuk menyelidiki lebih lanjut pengaruh opini audit serta dua variabel lainnya, yaitu *intergovernmental revenue* dan *tax effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pengujian gabungan dari ketiga variabel tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan daerah, di mana Ditasari & Sudrajat (2020) dan Lestari & Hapsari (2020) menyimpulkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, Kurnia (2020) serta Suryaningsih & Sisdyani (2016) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, analisis terhadap *intergovernmental revenue* dan *tax effort* juga menghasilkan perbedaan temuan, sehingga penelitian tambahan diperlukan untuk memperkuat bukti empiris yang ada.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang beragam tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh opini audit, *intergovernmental revenue*, dan *tax effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018-2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas hubungan antara variabel-variabel tersebut dan menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan serta kemandirian fiskal. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengembangan pengetahuan akademik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, tetapi juga untuk memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh opini audit, *intergovernmental revenue*, dan *tax effort*, diharapkan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja keuangan serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan menggambarkan hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana manajemen bertindak atas nama pemilik untuk memberikan layanan tertentu. Dalam prosesnya, kekuasaan untuk mengambil

keputusan didelegasikan dari pemilik kepada agen, selanjutnya agen memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemilik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan. Dilihat dari perspektif teori keagenan, hubungan antara masyarakat dan pemerintah mirip dengan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemisahan antara kepemilikan oleh prinsipal dan pengendalian oleh agen dalam suatu organisasi cenderung memicu konflik keagenan antara principal dan agen.

Menurut Masdiantini & Erawati (2016), teori keagenan memandang bahwa sering terjadi asimetri informasi antara agen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat. Asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah sebagai agen. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pemerintahan harus diawasi untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, hasil dari pengelolaan keuangan pemerintahan dapat dibuktikan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan seberapa baik agen mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh prinsipal. Teori keagenan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kinerja keuangan.

Teori Sumber Daya (*Resource Based-View Theory*)

Menurut Barney et al., (2011), teori RBV menjelaskan kerangka kerja yang mencakup aspek-aspek suatu entitas berdasarkan keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan. Teori ini berfokus pada kompetensi sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia yang kompeten dan ahli dapat meningkatkan kinerja dan menghasilkan informasi keuangan berkualitas. RBV relevan bagi organisasi sektor publik karena dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien, organisasi dapat secara efektif mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan teori ini berasumsi bahwa organisasi dapat memperoleh nilai tambah (*value added*) dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuannya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Menurut teori sumber daya (RBV), sumber daya seperti kompetensi manajerial, teknologi, informasi, dan sistem pengendalian internal sangat penting untuk mencapai kinerja keuangan yang baik. Pemerintah daerah yang memiliki dan mampu mengoptimalkan sumber daya ini akan lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, mengelola *intergovernmental revenue* dengan efektif, dan mengoptimalkan *tax effort*. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik. Secara keseluruhan, RBV memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana pengelolaan sumber daya internal yang efektif dapat meningkatkan berbagai aspek kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sari (2016), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja dalam bidang keuangan daerah, mencakup penerimaan serta pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam satu periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah akan menggambarkan seberapa berhasil pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi daerah melalui pelaksanaan kegiatan kerja. Di mana, evaluasi kegiatan kerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keuangan yang terlihat dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Menurut Sumarjo (2010), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi tingkat efisiensi dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan indikator rasio efisiensi, di mana rasio efisiensi merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menilai seberapa efisien pengeluaran biaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi.

Opini Audit

Menurut Utami & Sulardi, (2019), dalam konteks audit laporan keuangan, opini merujuk pada pernyataan profesional yang diberikan oleh auditor atau pemeriksa mengenai kewajaran pernyataan atau informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK merupakan sebuah lembaga independen yang memegang tanggung jawab untuk memeriksa keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat daerah. Opini audit dari BPK bukan hanya sekadar menjadi penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga dapat menjadi cerminan atas tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) terdapat lima jenis opini audit yang dapat diberikan oleh BPK, yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal atau dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue atau yang biasa disebut sebagai dana perimbangan adalah dana atau pendapatan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Patrick (2007), *intergovernmental revenue* merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pengembalian dana. Sumber pendapatan ini berasal dari transfer dana, hibah, subsidi, atau bentuk lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di tingkat daerah. Adapun sumber atau jenis dari dana perimbangan ini terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan utama dari dana perimbangan ini adalah untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya sendiri serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah (Satria & Sari, 2018).

Tax Effort

Tax effort adalah rasio yang membandingkan antara kemampuan pembayaran pajak potensial suatu daerah dengan penerimaan pajak aktualnya. *Tax effort* merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara kemampuan suatu daerah dalam membayar pajak dengan jumlah pajak yang diperoleh (Oktavia & Handayani, 2021). Menurut Muhammad (2021), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan masyarakat di suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak. Jika PDRB suatu daerah tinggi, maka dapat dipastikan bahwa kemampuan daerah tersebut dalam membayar pajak juga tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, dengan memahami *tax effort*, pemerintah daerah tentunya akan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperbaiki pengelolaan keuangan, serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat di tingkat daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut teori keagenan, opini audit yang baik menunjukkan bahwa agen telah memenuhi kewajibannya dengan baik, mengurangi masalah keagenan seperti asimetri informasi atau potensi penyelewengan, dan begitupun sebaliknya, opini audit yang tidak baik dapat mengindikasikan bahwa agen tidak transparan atau tidak efektif dalam pengelolaan keuangan, yang dapat menurunkan kepercayaan *principal*. Sementara itu, menurut teori sumber daya (RBV), sumber daya internal seperti kemampuan manajerial, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf keuangan sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Jika pemerintah daerah memiliki sumber daya ini dengan baik, maka opini audit yang diberikan oleh auditor akan lebih positif. Opini audit yang baik mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Az Zahrah et al., (2024), Suryaningsih & Sisdyani (2016), serta Masdiantini & Erawati (2016) yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana penilaian yang positif dari BPK bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam teori keagenan, *intergovernmental revenue* ini merupakan sumber daya yang diberikan principal (pemerintah pusat) kepada agen (pemerintah daerah) untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Penggunaan yang efektif dan efisien dari dana ini oleh agen akan meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik, yang akan mengurangi masalah keagenan, begitupun sebaliknya. Sementara itu, dari perspektif teori sumber daya (RBV), kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan pendapatan ini secara efektif adalah sumber daya yang berharga. Pengelolaan yang baik atas dana ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keuangan. Semakin besar *intergovernmental revenue* yang diterima oleh pemerintah daerah, maka akan semakin baik pula kinerja keuangan daerahnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aziz (2016), Nugroho & Prasetyo (2018), serta Dasmal et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Tax Effort* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam konteks teori keagenan, agen (pemerintah daerah) bertanggung jawab untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak untuk membiayai layanan publik. *Tax effort* yang tinggi menunjukkan bahwa agen sudah berusaha optimal untuk memenuhi kewajibannya kepada *principal*, hal ini akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengurangi masalah keagenan. Sementara itu, adapun menurut teori RBV, aset internal seperti sistem perpajakan yang efisien, teknologi informasi untuk administrasi pajak, dan kompetensi petugas pajak adalah sumber daya yang dapat meningkatkan *tax effort*. Pemerintah daerah yang dapat mengelola sumber daya ini dengan baik akan mampu meningkatkan pendapatan dari pajak,

yang akan memperbaiki kinerja keuangan daerahnya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani (2018) menyatakan bahwa, *tax effort* memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah yang juga didukung oleh penelitian Rumapea & Siringoringo (2020), serta penelitian Fadhli et al. (2023) yang menyatakan bahwa *tax effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana dengan adanya *tax effort* (upaya pajak) yang optimal, penerimaan daerah akan meningkat melalui pajak daerah yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya juga ikut meningkatkan tingkat kemandirian daerah terhadap pemerintah pusat. Dari uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H3: *Tax effort* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Penentuan sampel menggunakan metode total sampling, dengan total 95 sampel yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2022 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2018-2022 yang diakses melalui situs sumbar.bpk.go.id. dan data PDRB diperoleh dari situs sumbar.bps.go.id. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun data dari berbagai dokumen terkait. Data yang digunakan bersifat kuantitatif, berupa angka yang bersifat objektif, serta penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur lain seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber terkait lainnya.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah diukur melalui rasio efisiensi. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya diterima. Kinerja keuangan daerah dianggap efisien jika rasio tersebut kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi tingkat efisiensi, dan sebaliknya, semakin besar rasio, maka semakin rendah efisiensinya (Sesotyaningtyas, 2012). Adapun rumus untuk menghitung rasio efisiensi ini menurut Pramono (2014) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Opini Audit

Dalam audit laporan keuangan, opini adalah pernyataan profesional auditor mengenai kesesuaian asersi atau informasi keuangan dalam laporan tersebut. Opini audit yang diberikan oleh BPK dalam hal ini dapat menunjukkan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dalam penelitian ini, opini audit diukur menggunakan variabel dummy. Nilai 1 (satu) diberikan jika pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sebaliknya, nilai 0 (nol) diberikan jika menerima opini selain wajar tanpa pengecualian (non-WTP).

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue atau dikenal juga sebagai dana perimbangan adalah sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari sumber eksternal yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung kepada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam penelitian ini, variabel *intergovernmental revenue* dihitung dengan membandingkan total dana perimbangan dengan total pendapatan. Pemilihan pengukuran ini didasarkan pada fakta bahwa *intergovernmental revenue* merupakan sebagian dari pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber eksternal, yakni dari pemerintah pusat. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *intergovernmental revenue* menurut Sesotyaningtyas (2012):

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tax Effort

Tax effort merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Hal ini dinilai dengan cara memperbandingkan antara pendapatan pajak daerah yang sebenarnya dengan potensi pendapatan pajak daerah yang dapat diperoleh dari berbagai sumber pajak. Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai ukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Asmawanti et al. (2016), ketika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan wajib pajak di daerah tersebut untuk membayar pajak juga cenderung meningkat, begitu pula sebaliknya. Berikut merupakan rumus untuk menghitung *tax effort* (Asmawanti et al., 2016):

$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan, dengan tujuan menyederhanakan data agar lebih mudah diinterpretasikan. Proses ini dilakukan menggunakan rumus atau aturan tertentu sesuai pendekatan penelitian, untuk mengungkap informasi relevan yang terkandung dalam data. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan bantuan *software* statistik SPSS versi 25. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk memprediksi pengaruh variabel independen, seperti opini audit, *intergovernmental revenue*, dan *tax effort*, terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Model persamaan statistik yang digunakan dirancang untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{KKPD} = \alpha + \beta_1\text{OA} + \beta_2\text{IR} + \beta_3\text{TE} + \epsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_OA	95	.00	1.00	.9684	.17580

X2_IR	95	.64	.99	.7622	.05105
X3_TE	95	.12	.93	.3099	.18058
Y_KKPD	95	.81	1.16	.9414	.07651
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data Olahan SPSS 25, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1, variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, memiliki nilai terendah 0,81 dan tertinggi 1,16, dengan rata-rata 0,9684 serta standar deviasi 0,07651. Variabel independen pertama, yaitu opini audit, menunjukkan nilai minimum 0,00 dan maksimum 1,00, dengan nilai rata-rata 0,9684 dan standar deviasi 0,17580. Variabel independen kedua, *intergovernmental revenue* memiliki nilai minimum 0,64 dan maksimum 0,99, dengan rata-rata 0,7622 serta standar deviasi 0,05105. Untuk variabel independen ketiga, yaitu *tax effort*, nilai minimumnya adalah 0,12 dan nilai maksimumnya 0,93 dengan rata-rata 0,3099 serta standar deviasi 1,18058. Nilai-nilai ini menggambarkan sebaran dan variasi data yang digunakan dalam analisis penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas (Data *Outlier*)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05842039
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.057
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.079 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Olahan SPSS 25, Tahun 2024

Menurut Ghozali (2021), meskipun normalitas variabel tidak selalu menjadi syarat dalam analisis, tetapi hasil uji statistik akan lebih optimal jika semua variabel berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan, apabila variabel tidak berdistribusi normal, maka kualitas hasil uji statistik akan terdegradasi (cenderung menurun). Berdasarkan tabel hasil uji normalitas tersebut, diketahui bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi dengan normal yang dikarenakan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,079 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual dalam model regresi linear berganda pada penelitian ini terpenuhi.

Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1_OA	.693	1.443
	X2_IR	.721	1.387
	X3_TE	.946	1.057

Dependent Variable: Y_KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 25, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10. Selain itu, hasil perhitungan VIF juga mengindikasikan bahwa tidak ada variabel independen dengan nilai VIF melebihi 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada variabel-variabel dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.084	.145		-.580	.564
	X1_OA	.052	.042	.177	1.234	.221
	X2_IR	.086	.158	.076	.543	.589
	X3_TE	.056	.056	.124	1.010	.316

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Olahan SPSS 25, Tahun 2024

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa setiap variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.549 ^a	.302	.271	.05971	1.829

a. Predictors: (Constant), X3_TE, X2_IR, X1_OA

b. Dependent Variable: Y_KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 25, Tahun 2024

Oleh karena nilai DW 1,829 lebih besar dari batas atas (DU) 1,703 dan kurang dari 4-1,703 (4-DU), di mana $DW > DU$ dan $< 4-DU$ yaitu $1,829 > 1,703$ dan $1,703 < 2,297$ (4-DU). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen dalam penelitian ini, sehingga model regresi layak digunakan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.310	.250		1.243	.218
	X1_OA	-.027	.072	-.047	-.381	.705
	X2_IR	.712	.272	.315	2.617	.011
	X3_TE	.402	.096	.439	4.180	.000

a. Dependent Variable: Y_KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 25, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KKPD = 0,0310 - 0,027 OA + 0,712 IR + 0,402 TE + E$$

Nilai konstanta yang diperoleh dari persamaan sebesar 0,310 menunjukkan bahwa jika variabel opini audit, *intergovernmental revenue*, dan *tax effort* bernilai 0, maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat diprediksi sebesar 0,310. Koefisien regresi untuk variabel opini audit bernilai negatif, yaitu -0,027, yang berarti bahwa jika pemerintah daerah memperoleh opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (non-WTP), kinerja keuangan diperkirakan akan turun sebesar 0,027 unit dibandingkan dengan daerah yang mendapat opini WTP. Koefisien regresi untuk *intergovernmental revenue* bernilai positif sebesar 0,712, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam *intergovernmental revenue* akan meningkatkan kinerja keuangan daerah sebesar 0,712 unit. Koefisien regresi untuk variabel *tax effort* juga bernilai positif, sebesar 0,402, yang berarti bahwa peningkatan satu unit dalam *tax effort* akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,402 unit. Hasil ini menggambarkan hubungan antara variabel independen terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Squared)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	.549 ^a	.302	.271	.05971
---	-------------------	------	------	--------

a. Predictors: (Constant), X3_TE, X2_IR, X1_OA

b. Dependent Variable: Y_KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 25, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* pengaruh simultan X1, X2, dan X3 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah senilai 0,271, artinya pengaruh variabel opini audit, *intergovernmental revenue*, dan *tax effort* secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 27,1%, sedangkan sisanya sebesar 72,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji F (F-Test)

Hasil uji F (F-Test) adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.103	3	.034	9.658	.000 ^b
	Residual	.239	67	.004		
	Total	.342	70			

a. Dependent Variable: Y_KKPD

b. Predictors: (Constant), X3_TE, X2_IR, X1_OA

Sumber: Data Olahan SPSS 25, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui F hitung 15,616 > F tabel sebesar 2,74 dengan nilai signifikansi hasil uji F sebesar 0,000 yang berarti $0,000 < 0,05$. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit (X1), *intergovernmental revenue* (X2), dan *tax effort* (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

Uji t (Partial Test)

Hasil uji t (Partial Test) adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients			
		B	Std. Error	t	Sig.
1	(Constant)	.310	.250	1.243	.218
	X1_OA	-.027	.072	-.381	.705
	X2_IR	.712	.272	2.617	.011
	X3_TE	.402	.096	4.180	.000

a. Dependent Variable: Y_KKPD

Sumber: Data Olahan SPSS 25 Tahun 2024

- 1) Hipotesis pertama menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel, nilai t sebesar -0,381 dan koefisien regresi -0,027, dengan nilai signifikan (sig) 0,705. Karena nilai sig 0,705 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis pertama (H1) dinyatakan ditolak. Jika dilihat dari perbandingan antara t hitung (-0,381) dengan t tabel (1,998), diketahui bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel. Oleh karena itu, hipotesis pertama juga ditolak berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel.
- 2) Hipotesis kedua menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel, nilai t sebesar 2,617 dan koefisien regresi 0,712, dengan nilai signifikan (sig) 0,011. Karena nilai sig 0,011 lebih kecil dari 0,05, hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima. Jika dibandingkan nilai t hitung (2,617) dengan t tabel (1,998), diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. Oleh karena itu, hipotesis kedua juga diterima berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel.
- 3) Hipotesis ketiga menyatakan bahwa *tax effort* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel, nilai t adalah 4,180 dan koefisien regresi 0,402, dengan nilai signifikan (sig) 0,000. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima. Jika dibandingkan antara nilai t hitung (4,180) dan t tabel (1,998), t hitung lebih besar dari t tabel. Oleh karena itu, hipotesis ketiga juga diterima berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel.

Pembahasan

Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini yaitu opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji statistik t menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H1 dalam penelitian ini ditolak. Tidak adanya pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh fakta bahwa opini audit yang diberikan oleh BPK lebih menekankan pada kewajaran dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, bukan pada evaluasi kinerja secara langsung. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Hapsari (2020), Ditasari & Sudrajat (2020), dan Az Zahrah et al. (2024) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori agensi, opini audit tidak selalu mencerminkan kinerja sebenarnya dari pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh *principal* karena opini audit lebih berfokus pada kepatuhan terhadap aturan akuntansi dan kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, meskipun opini audit dapat dijadikan alat untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan agen, tetapi hal ini tidak sepenuhnya dapat menilai seberapa baik agen (pemerintah) telah memanfaatkan sumber daya yang dipercayakan untuk mencapai hasil yang optimal (Masdiantini & Erawati, 2016). Adapun menurut teori RBV, keberhasilan kinerja pemerintah daerah lebih bergantung pada bagaimana mereka menggunakan dan mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti meningkatkan pelayanan publik atau mengembangkan infrastruktur daerah (Tama, 2015). Opini audit yang lebih berfokus pada aspek teknis pelaporan keuangan tidak mengevaluasi kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya strategis tersebut. Oleh karena itu, meskipun

sebuah daerah mendapatkan opini audit yang baik, hal ini tidak berarti bahwa daerah tersebut secara efektif memanfaatkan sumber dayanya untuk mencapai kinerja keuangan yang baik.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yaitu *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji statistik t menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H2 dalam penelitian ini diterima. Besarnya *intergovernmental revenue* menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki dana yang memadai untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2016), Dasmara et al. (2020), dan Nugroho & Prasetyo (2018) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) dalam konteks pengelolaan sumber daya, di mana dalam hal ini masyarakat dan pemerintah pusat berperan sebagai principal yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola dana publik. *Intergovernmental revenue* membantu mengurangi masalah asimetri informasi antara principal dan agen dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif (Masdiantini & Erawati, 2016). Adapun menurut teori Sumber Daya (RBV) yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya internal yang unik untuk mencapai keunggulan kompetitif, *intergovernmental revenue* dalam hal ini sebagai sumber daya eksternal yang signifikan, memungkinkan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangannya. Dengan tambahan dana ini, pemerintah daerah dapat lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, meningkatkan infrastruktur, serta memperbaiki layanan publik. Dalam hal ini, *intergovernmental revenue* meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan memberikan kapasitas tambahan untuk investasi dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik dan stabil.

Pengaruh *Tax Effort* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini yaitu *tax effort* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji statistik t menunjukkan bahwa *tax effort* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H3 dalam penelitian ini diterima. Pengaruh positif *tax effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022 berarti bahwa *tax effort* dapat mencerminkan intensitas dan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak. Hasil penelitian ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani (2018), Rumapea & Siringoringo (2020), dan Fadhlil et al. (2023) yang menyatakan bahwa *tax effort* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam konteks *tax effort*, berdasarkan teori agensi, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pengumpulan pajak merupakan refleksi dari komitmen mereka untuk memenuhi ekspektasi *principal* (masyarakat dan pemerintah pusat). Ketika pemerintah daerah melakukan usaha yang maksimal untuk mengoptimalkan pendapatan pajak untuk mengurangi masalah asimetri informasi, yaitu ketidaksesuaian informasi antara prinsipal dan agen tentang bagaimana sumber daya dikelola, ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan dana dengan lebih baik, yang berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan

(Masdiantini & Erawati, 2016). Adapun menurut teori Teori Sumber Daya (RBV) yang menekankan pentingnya sumber daya internal yang unik dan dikelola dengan baik untuk mencapai keunggulan kompetitif, di mana *tax effort* yang tinggi meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). RBV menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif adalah kunci untuk mencapai kinerja yang superior. Dengan upaya pajak yang tinggi, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga memperbaiki efisiensi pengelolaan keuangan, yang memungkinkan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan, di samping juga untuk memperkuat posisi fiskal daerah (Rahmayani, 2018).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, *intergovernmental revenue*, dan *tax effort* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2022. Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 2) *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3) *Tax effort* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan tahun pengamatan dari tahun 2018-2022 sehingga tidak sepenuhnya mewakili tren jangka panjang.
- 2) Nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 31,8% yang menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hanya 31,8%, sehingga masih banyak variabel lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3) Penggunaan metode analisis tertentu seperti uji koefisien determinasi, kemungkinan akan menciptakan perbedaan hasil yang diperoleh jika menggunakan pendekatan analisis yang berbeda.
- 4) Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke luar konteks dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat karena adanya perbedaan karakteristik di setiap daerah baik dari segi kebijakan keuangan maupun kondisi ekonominya.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperhatikan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang merupakan dasar dari kepercayaan publik. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk:

- 1) Mempertimbangkan variabel independen lain yang berkemungkinan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 2) Mencoba metode analisis yang berbeda, seperti regresi panel data atau metode kausalitas untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil dari analisis yang lebih mendalam atau dengan periode waktu yang lebih panjang.

- 3) Untuk meningkatkan generalisasi temuan, maka dapat dilakukan studi serupa di provinsi atau wilayah lain di Indonesia, sehingga dapat dibandingkan apakah hasilnya konsisten atau terdapat perbedaan antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawanti, D., Elvandari, N., & Baihaqi, B. (2016). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 35–52. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.6.1.35-52>
- Az Zahrah, F., Zaen, M. R., & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(1), 369–384.
- Aziz, A. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 86–101. <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34>
- Barney, J. B., Ketchen, D. J., & Wright, M. (2011). The future of resource-based theory: Revitalization or decline? *Journal of Management*, 37(5), 1299–1315. <https://doi.org/10.1177/0149206310391805>
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Badan Pusat Statistik (BPS) Diakses pada 24 Juni 2024. Dari <https://sumbar.bps.go.id>.
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 39. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10788>
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–14.
- Fadhli, F., Asnawi, A., & Jummaini, J. (2023). Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i2.8884>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kurnia, D. (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 112–124. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.11>
- Lestari, E., & Hapsari, D. W. (2020a). *Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah*

- (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 7(2), 1–8.
- Lestari, E., & Hapsari, D. W. (2020b). PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018) *THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURE, LOCAL*. 7(2), 2743–2750.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150–1182.
- Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan, PDRB Per Kapita, Tax Effort, Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 1–9. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 430–443.
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–20.
- Patrick, P. A. (2007). The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. *Doctoral Dissertation, Pennsylvania State University, May*. https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/4828
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.
- Rahmayani, M. W. (2018). Analisis Tentang Kemandirian Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 5, 1–10.
- Rumapea, M., & Siringoringo, G. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 150–164. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.48>
- Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *At-Tasyri' ; Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 10, N, 9–21.

- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 2. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta*, 1–76.
- Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1453–1481.
- Utami, S. R., & Sulardi. (2019). SHAFIRA RAMADHIA UTAMI (shafirarutami@gmail.com) SULARDI. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253–263. www.jab.fe.uns.ac.id